



PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan responsif, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pelayanan publik;
- b. bahwa Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1476) ditambahkan angka 109 sampai dengan angka 169 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

MOHAMMAD SYAFII

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP	UNIT KERJA
109.	01 Tahun 2022	SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
110.	02 Tahun 2022	SOP Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pusat	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
111.	03 Tahun 2022	SOP Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) UPT	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
112.	4 Tahun 2022	SOP Permintaan Pembayaran LS Pihak Bendahara	Biro Perencanaan dan Keuangan
113.	5 Tahun 2022	SOP Permintaan Pembayaran LS Pihak Ketiga	Biro Perencanaan dan Keuangan
114.	06 Tahun 2022	SOP Permohonan Mutasi/Pindah Pegawai atas Permintaan Sendiri antar unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
115.	07 Tahun 2022	SOP Pengadaan Barang/Jasa	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
116.	01 Tahun 2023	SOP Revisi Kewenangan Dit. PA DJPB - Kemenkeu	Biro Perencanaan dan Keuangan
117.	02 Tahun 2023	SOP Revisi Anggaran Kewenangan KPA	Biro Perencanaan dan Keuangan
118.	03 Tahun 2023	SOP Laporan Hasil Analisa Revisi Anggaran	Biro Perencanaan dan Keuangan
119.	04 Tahun 2023	SOP Revisi Anggaran	Biro Perencanaan dan

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP	UNIT KERJA
		Kewenangan Kanwil	Keuangan
120.	05 Tahun 2023	SOP Revisi Kewenangan DJA	Biro Perencanaan dan Keuangan
121.	06 Tahun 2023	SOP Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	Biro Perencanaan dan Keuangan
122.	07 Tahun 2023	SOP Penyusunan Pagu Anggaran	Biro Perencanaan dan Keuangan
123.	08 Tahun 2023	SOP Penyusunan Pagu Indikatif	Biro Perencanaan dan Keuangan
124.	09 Tahun 2023	SOP Penyusunan Pagu Kebutuhan	Biro Perencanaan dan Keuangan
125.	10 Tahun 2023	SOP Perencanaan Pengadaan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
126.	11 Tahun 2023	SOP Persiapan Pengadaan melalui E-Purchasing	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
127.	12 Tahun 2023	SOP Usulan Penyesuaian TRT	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
128.	13 Tahun 2023	SOP Kenaikan Pangkat Reguler	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
129.	14 Tahun 2023	SOP Usulan Pensiun atas Permintaan Sendiri	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
130.	15 Tahun 2023	SOP Usulan Pensiun PNS BUP	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
131.	16 Tahun 2023	SOP Permohonan Cuti	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
132.	17 Tahun 2023	SOP Usulan Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian dan Ortala	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
133.	18 Tahun 2023	SOP Permohonan Data Kepegawaian	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
134.	19 Tahun 2023	SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
135.	20 Tahun 2023	SOP Permohonan Mutasi/Pindah Pegawai atas Permintaan Sendiri Antar Unit Kerja	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
136.	21 Tahun 2023	SOP Usulan Penawaran Beasiswa ke Luar Negeri	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
137.	22 Tahun 2023	SOP Penawaran Beasiswa ke Luar Negeri	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
138.	23 Tahun 2023	SOP Kenaikan Gaji Berkala	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP	UNIT KERJA
139.	24 Tahun 2023	SOP Penataan Organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
140.	25 Tahun 2023	SOP Pencantuman Gelar Akademik	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
141.	26 Tahun 2023	SOP Pelayanan Usulan Pembuatan Karpeg, Karis, dan Karsu	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
142.	27 Tahun 2023	SOP Tugas Belajar Belajar Mandiri	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
143.	01 Tahun 2024	SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja	Pusat Data dan Informasi
144.	02 Tahun 2024	SOP Penyusunan Laporan Kinerja	Pusat Data dan Informasi
145.	03 Tahun 2024	SOP Standar pelayanan permohonan penempatan tugas praktek	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
146.	04 Tahun 2024	SOP Standar Pelayanan Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
147.	05 Tahun 2024	SOP Standar Pelayanan permohonan informasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
148.	06 Tahun 2024	SOP Standar pelayanan pelatihan pencarian dan pertolongan	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
149.	07 Tahun 2024	SOP Pelaporan Gratifikasi	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
150.	08 Tahun 2024	SOP penyusunan RTP-SPIP	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang
151.	09 Tahun 2024	SOP Penerimaan Berita pada Emergency Call 115	Direktorat Kesiapsiagaan
152.	10 Tahun 2024	SOP Aktivasi Tim Inasar di Basarnas Command Centre	Direktorat Kesiapsiagaan
153.	11 Tahun 2024	SOP Verifikasi Berita Pencarian dan Pertolongan	Direktorat Kesiapsiagaan
154.	12 Tahun 2024	SOP Penanganan Informasi Kedaruratan Pesawat Udara	Direktorat Kesiapsiagaan
155.	13 Tahun 2024	SOP Penanganan Marabahaya DSC di Basarnas Commad Center (BCC)	Direktorat Kesiapsiagaan
156.	14 Tahun 2024	SOP Penanganan Marabahaya ELT di Basarnas Commad Center (BCC)	Direktorat Kesiapsiagaan
157.	15 Tahun 2024	SOP Penanganan Marabahaya EPIRB di Basarnas Command Center (BCC)	Direktorat Kesiapsiagaan

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP	UNIT KERJA
158.	16 Tahun 2024	SOP Penanganan Marabahaya PLB di Basarnas Command Center (BCC)	Direktorat Kesiapsiagaan
159.	17 Tahun 2024	SOP Penanganan Berita Pencarian dan Pertolongan di BCC	Direktorat Kesiapsiagaan
160.	18 Tahun 2024	SOP Penunjukan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan	Direktorat Kesiapsiagaan
161.	19 Tahun 2024	SOP Proses Utama Barang/Jasa	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
162.	20 Tahun 2024	SOP Pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
163.	21 Tahun 2024	SOP Tender Pascakualifikasi Harga Terendah Sistem Gugur	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
164.	22 Tahun 2024	SOP Pemilihan Penyedia Melalui E-Purchasing Jenis Pekerjaan Kontruksi	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
165.	23 Tahun 2024	SOP Pemilihan Penyedia melalui E-Purchasing Jenis Barang/Jasa Lainnya	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
166.	24 Tahun 2024	SOP Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
167.	25 Tahun 2024	SOP Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
168.	26 Tahun 2024	SOP Pengelolaan Risiko Pengadaan Barang/Jasa	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
169.	27 Tahun 2024	SOP Pengelolaan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD SYAFII